

Date: 21 July 2020

	Indonesia: World Bank Watchdog Accepts Complaint Against Indonesian Mine	Indonesia: Pengawas Bank Dunia Menerima Pengaduan Melawan Tambang Indonesia
1	The International Finance Corporation's independent watchdog has accepted a formal complaint concerning a planned zinc mine in North Sumatra, Indonesia, that will create millions of cubic meters of toxic tailings in one of the world's highest earthquake risk zones. The watchdog, the Compliance Advisor Ombudsman, has accepted the complaint because an IFC client, Postal Savings Bank of China, loaned money to the mine's lead developer, in apparent contravention of the World Bank Group member's human rights and environmental standards. The mine's developer is Dairi Prima Minerals (DPM) which is now 51% owned by China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC) and 49% owned by Indonesia's Bumi Resources Minerals.	Pengawas independen International Finance Corporation telah menerima secara formal pengaduan terkait tambang seng yang direncanakan ada di Sumatra Utara, Indonesia, yang mana akan menciptakan jutaan meter kubik tailing beracun di salah satu wilayah dengan risiko gempa bumi tertinggi di dunia. Pengawas tersebut, Compliance Advisor Ombudsman, menerima pengaduan yang dimaksud dengan alasan klien IFC, yaitu Postal Savings Bank of China, telah meminjamkan dana ke pengembang utama tambang, di mana hal tersebut bertentangan dengan standar HAM dan lingkungan anggota kelompok Bank Dunia. Pengembang tambang adalah Dairi Prima Minerals (DPM) yang sekarang 51% (sahamnya) dimiliki oleh China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd (NFC) Industri Logam Nonferrous China dan 49% dimiliki oleh Bumi Resources Minerals Indonesia.
2	Residents of two villages near the mine filed the complaint in October, with the help of the U.S. organization Inclusive Development International and BAKUMSU, a legal rights organization based in Medan, the capital of North Sumatra. The communities are calling for the IFC and Postal Savings Bank to use their leverage to get proper information about the mine, which is in the early stages of development.	Penduduk di dua desa di dekat tambang mengadukan keluhan mereka pada Oktober 2019, dengan bantuan dari organisasi dari AS, Inclusive Development International, dan BAKUMSU, organisasi Bantuan Hukum yang berada di Medan, ibu kota Sumatra Utara. Masyarakat menghimbau agar IFC dan Postal Savings Bank menggunakan posisi mereka untuk menghentikan tambang, yang saat ini masih dalam tahap awal pembangunan.
3	"We were not consulted about this mine. We have not been told what this mine will be doing and what impacts it will have. "At very least, we want dialogue. We want to have proper information in front of us, and we want that information reviewed by international experts" said Mr. Sugianto Hasugian, a resident of Bongakaras village involved in the complaint. "If we are going to be potentially living around or down from a potential disaster, we deserve to be consulted and informed. "This mine could	"Kami tidak diajak berdialog soal tambang ini. Kami belum diberi tahu apa yang akan dilakukan tambang ini dan apa dampaknya. Paling tidak, kami menginginkan dialog, kami harus dihargai sebagai penduduk local yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal dan hidup di Dairi, kami berhak tau atas rencana pembangunan yang datang ke wilayah kami. Kami ingin informasi yang benar di depan dan kami ingin informasi tersebut dipelajari oleh para pakar internasional," ujar Bapak Sugianto Hasugian, seorang penduduk dusun Bongkaras 2 desa Bongkaras yang terlibat dalam pengaduan. "Jika kemungkinan kami harus hidup di sekitar atau di bawah area dengan potensi bencana, maka kami layak diajak berdialog dan diinformasikan." "Tambang ini berpotensi menghasilkan jutaan meter kubik limbah beracun. Kami ingin tahu apa yang akan mereka lakukan dengan limbah tersebut.

	produce millions of cubic meters of toxic waste. We want know what they will do with it. We know tailings dams leak and can collapse. We know the DPM mine is at the top of a stream system and we are down from it. We don't want to live under constant threat of tailings dam collapse" said Ms. Rainim Purba, a resident of Pandiangan village involved in the complaint. "Dairi has a very high earthquake and flood risk. So why is this project being allowed?? Why are banks providing money to this company?? It is they who will be responsible for the disaster that may kill us in the future" said Pak Mangatur Pardamean Lumbantoruan, a resident from Sumbari village involved in the complaint. "We are Batak Toba and Pak Pak people. We are farmers. We have been farming our land for generations. We produce crops that feed ourselves and support the wider economy. We do not want our lands and waterways poisoned. A mine is only for a short time, then leaves a huge mess. That is not the sort of development we want for our area" said Ms. Rainim Purba, a resident of Pandiangan.	Mereka harus memprioritaskan keselamatan masyarakat yang tinggal disekitar proyek mereka, Kami tahu bendungan tailing bisa berpotensi bocor dan bisa runtuh. Kami tahu tambang DPM berada di atas sistem aliran sungai dan kami di bawahnya. Kami tidak mau hidup terancam bendungan tailing yang bisa runtuh, "kata Ibu Rainim Purba, seorang penduduk desa Pandiangan yang terlibat dalam pengaduan. "Dairi memiliki risiko gempa dan banjir yang sangat tinggi. Jadi mengapa proyek ini diperbolehkan?? Mengapa bank memberikan uang kepada perusahaan ini?? Merekalah yang akan bertanggung jawab kalau bencana terjadi dan membunuh kami di masa depan, "kata Bapak Mangatur Pardamean Lumbantoruan, seorang warga dari desa Sumbari yang terlibat dalam pengaduan. "Kami orang Batak Toba dan Pak Pak. Kami bekerja sebagai petani. Kami sudah menanam tanah kami selama beberapa generasi lamanya. Kami menghasilkan tanaman yang bisa mencukup kebutuhan kami sendiri dan mendukung ekonomi secara luas. Kami tidak ingin tanah dan perairan kami diracuni. Tambang hanya beroperasi dalam waktu singkat, tapi kekacauan yang ditinggalkannya besar dan tidak bisa tergantikan dengan uang . Bukan itu pembangunan yang kami inginkan untuk daerah kami" kata Ibu Rainim Purba, seorang warga dari desa Pandiangan.
4	YDPK, a local NGO working in the Parongil area, where the mine is proposed have been trying to assist the communities get information. "We have requested information from the Ministry of Minerals and Energy but they didn't provide it. We then requested the national information commission to access and provide information. They too have not done so" said Diaconess Sarah Naibaho, Executive Director of YDPK. "People are in the dark as to the possible impacts of this mine – and that in itself is an abuse of rights" she said.	YDPK, LSM lokal yang bekerja di daerah Parongil, tempat tambang direncanakan berada, telah berupaya membantu masyarakat mendapatkan informasi. Informasi ini merupakan instrument yang sangat penting untuk masyarakat dalam mengawasi proses investasi dan mengawasi tanggungjawab perusahaan atas lingkungan. "Kami sudah meminta informasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tetapi mereka tidak memberikannya. Kami kemudian meminta Komisi Informasi Pusat untuk mengakses dan memberikan informasi. Mereka juga belum memberikan", kata Diaconess Sarah Naibaho, Direktur Eksekutif YDPK. "Masyarakat tidak punya informasi tentang perencanaan tambang dan petunjuk kemungkinan dampak apa yang dimiliki tambang ini - dan hal itu sendiri sudah merupakan pelanggaran hak masyarakat mendapatkan akses informasi public termasuk dokumen perijinan yang mengancam hajat hidup orang banyak" katanya.

5	Ridwan Samosir, Executive Director of PETRASA said “We too have been trying to support communities for sustainable agriculture - but the DPM mine potentially threatens that work we and communities have done. “DPM and government are not being straightforward in providing information. We know the mine is in an area of high risk. Where is the waste management plan?” he said.	Ridwan Samosir, Direktur Eksekutif PETRASA, mengatakan, “Selama ini kami juga berusaha membantu masyarakat mengembangkan pertanian berkelanjutan - tetapi dengan adanya tambang DPM, ia berpotensi mengancam pekerjaan yang kami lakukan bersama masyarakat . “DPM dan pemerintah kurang lugas dalam memberikan informasi. Kami tahu tambang berada di daerah berisiko tinggi. Tapi dimana rencana pengelolaan limbahnya? " sambungnya.
6	BAKUMSU, a legal aid organization based in Medan, the capital of North Sumatra, Medan have been asked to support the local communities. Manambus Pasaribu, the Executive Secretary, said “we have been doing a legal analysis if the mine. There are a number of issues. We think the mine may not fully comply with Indonesian laws”. “We have seen letters between a Parongil resident and the Ministry of Environment and Forestry’s AMDAL section saying that while DPM produced an AMDAL that was approved in 2005, they now need new environmental approval. In January 2019 DPM were informed of this. In March 2020 they still had not obtained new environmental approval”. “We also know that the area is high disaster risk. Indonesian law says projects like mining in areas like this need to have risk analysis and risk management plans done”. We have asked government for details on this but we cannot find any evidence to suggest the proper risk analysis has been done. We cannot find evidence that risk management plans have been done or approved” “DPM have built an explosives storage facility within 50 meters of houses in a village. This seems in contravention to regulations. We know from media reports that China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC) - which is now the majority shareholder and operator of the mine - had an explosion at a explosives storage facility in Zambia in 2005 that killed 46 people.”	BAKUMSU, sebuah lembaga bantuan hukum yang berbasis di Medan, ibukota Sumatera Utara, telah diminta masyarakat setempat untuk membantu. Manambus Pasaribu, Sekretaris Eksekutifnya, mengatakan, “Kami sudah melakukan analisis hukum tambang. Kami menemukan sejumlah persoalan. Kami kira tambang tidak sepenuhnya mematuhi hukum negara Indonesia ”. “Kami telah melihat korespondensi yang dilakukan salah seorang warga Parongil dengan bagian AMDAL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana dikatakan bahwa meski DPM memiliki AMDAL yang disetujui pada 2005, saat ini mereka membutuhkan persetujuan lingkungan yang baru. Pada Januari 2019, DPM diinformasikan mengenai hal ini. Namun, hingga bulan Maret 2020 mereka masih belum punya persetujuan lingkungan baru.” “Kami juga tau bahwa ada risiko bencana yang besar. Hukum di Indonesia menyatakan bahwa untuk proyek semacam penambangan di wilayah seperti ini harus diadakan analisis risiko dan rencana pengelolaan risiko. Kami sudah meminta perincian masalah ini kepada pemerintah, akan tetapi kami tidak menemukan bukti bahwa sudah pernah dilakukan analisis risiko yang layak. Kami juga tidak menemukan bukti sudah ada atau sudah disetujuinya rencana pengelolaan risiko.” “DPM telah membangun fasilitas gudang penyimpanan bahan peledak dalam jarak 50 meter dari pemukiman warga di sebuah desa. Hal ini bertentangan dengan peraturan yang ada. Kami tahu dari laporan media bahwa China Nonferrous Metal Industry Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC) - yang sekarang menjadi pemegang saham utama dan operator tambang - fasilitas penyimpanan bahan peledaknya yang berada di Zambia pernah meledak pada tahun 2005 yang menewaskan 46 orang." Pembangunan fasilitas gudang Handak ini tentu sangat beresiko terhadap keselamatan warga sekitar

7	Mr. Merah Johansyah, National Coordinator of JATAM, a national network of NGOs and Community organization that concerns on human rights and environment issues in the mining and oil and gas industry group dedicated to minimizing the detrimental impacts of mining in Indonesia said: “The problem is that mines like this create a lot of toxic waste - especially where there are high levels of lead and other heavy metals – as is the case with the proposed DPM mine.” He added, “Indonesia does not have a solid regulatory framework nor the capacity to ensure mining disasters don’t occur. Putting the DPM mine in such a high disaster risk area is just insane. “Anyone putting money into this project should think again” he said. “NFC has been operating around the world. Huge environmental and human rights issues have been reported in countries like Zambia, Congo, Mongolia, Vietnam, Myanmar. Bumi resources has also been creating havoc with coal mining in Indonesia. What we have is a perfect storm of low regulation, companies with a poor track record, and a very high seismic and flood risk”.	Bapak Merah Johansyah, Koordinator Nasional JATAM, adalah sebuah jaringan organisasi non pemerintah (ornop) dan organisasi komunitas yang peduli terhadap masalah-masalah Hak Asasi Manusia dan lingkungan hidup dalam industri pertambangan dan migas yang bekerja untuk meminimalkan dampak merugikan pertambangan di Indonesia mengatakan: “Masalahnya adalah tambang seperti ini menghasilkan banyak limbah beracun - terutama ketika terdapat timbal dalam kadar tinggi dan logam berat lainnya - sebagaimana kasusnya dengan tambang DPM yang diusulkan. " Dia menambahkan, “Indonesia tidak memiliki kerangka peraturan yang solid ataupun kapasitas untuk menjamin bahwa bencana penambangan tidak akan terjadi. Menempatkan tambang DPM di daerah berisiko bencana setinggi itu sungguh merupakan tindakan di luar logika. "Siapa pun yang mendanai proyek ini harus berpikir ulang," katanya. “NFC telah beroperasi di seluruh dunia. Sudah banyak persoalan lingkungan dan hak asasi manusia berat yang telah dilaporkan di negara-negara seperti Zambia, Kongo, Mongolia, Vietnam, Myanmar. Bumi Resources juga ikut menciptakan kekacauan dengan tambang batubaranya di Indonesia. Yang sekarang kita hadapi adalah bencana yang berangkat dari perpaduan sempurna antara peraturan yang tidak lengkap, dan- perusahaan dengan rekam jejak yang buruk, dan risiko gempa serta banjir yang sangat tinggi”.
8	“The communities have shown great courage in bringing this complaint in an effort to protect the environment and their way of life. The Compliance Advisor Ombudsman’s acceptance of the complaint is an important step in avoiding that,” said David Pred, Executive Director of Inclusive Development international, a US-based NGO that has been assisting communities and local NGOs with understanding the finance chain behind DPM and the international experiences of mining in high risk areas. “What is being proposed is the creation of tailings storage facilities in an extremely unstable and risk prone area. People living downstream from the mine site will be forever living in fear of dam collapse and water contamination. Dam collapses in other areas of the world – even without such high earthquake risk – have destroyed villages, killed hundreds of people and poisoned the environment for generations.”	“Masyarakat telah menunjukkan keberanian yang besar dengan melakukan pengaduan ini sebagai upaya untuk melindungi lingkungan dan tradisi hidup mereka. Dengan Compliance Advisor Ombudsman menerima pengaduan mereka tersebut, maka hal tersebut sudah merupakan langkah penting agar <i>kekhawatiran</i> tersebut tidak terjadi ” demikian disampaikan David Pred, Direktur Eksekutif Inclusive Development International, sebuah LSM yang berbasis di Amerika yang telah membantu masyarakat dan LSM lokal dengan membuka wawasan mereka mengenai rantai keuangan yang berada di balik DPM dan pengalaman mengenai tambang yang berada di wilayah berisiko tinggi di seluruh dunia. “Yang diajukan adalah pembuatan fasilitas penyimpanan tailing di area dengan risiko tinggi dan tidak stabil. Masyarakat yang hidup di bawah lokasi tambang selamanya akan hidup dalam ketakutan akan runtuhnya bendungan dan tercemarnya air. Bendungan yang runtuh di bagian lain di dunia – yang bahkan tidak disertai risiko tinggi gempa bumi semacam itu – telah menghancurkan banyak desa, membunuh ratusan orang, dan meracuni lingkungan selama bergenerasi-generasi lamanya.”

9	The IFC made a \$300 million equity investment in Postal Savings Bank in 2015, after which the bank provided several lines of credit to China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC) and its parent, the China Nonferrous Metals Mining Group. The IFC has increasingly outsourced billions of dollars to commercial banks around the world, which have gone on to finance nearly 150 socially and environmentally harmful <u>projects</u> , according to research led by Inclusive Development International.	IFC melakukan investasi ekuitas/saham sebanyak \$300 juta di Postal Savings Bank pada 2015, setelah itu bank memberikan serangkaian kredit kepada China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC) dan perusahaan induknya, China Nonferrous Metals Mining Group. IFC menyalurkan nilai hingga jutaan dolar ke bank-bank komersial di seluruh dunia, yang mana sudah membiayai hingga hampir 150 proyek yang membahayakan secara sosial dan lingkungan, menurut riset yang dilakukan oleh Inclusive Development International.
10	This is the first complaint involving a Chinese financial institution accepted by the Compliance Advisor Ombudsman. The complainants will have the option of pursuing dispute resolution with the parties or calling for an investigation of the IFC's compliance with its policies.	Pengaduan ini merupakan yang pertama yang melibatkan lembaga keuangan Tiongkok yang diterima oleh Compliance Advisor Ombudsman. Pihak pengadu memiliki opsi untuk menempuh jalur resolusi dengan pihak-pihak terkait atau meminta penyelidikan terkait kepatuhan IFC terhadap kebijakannya sendiri.
11	The zinc mine is being developed by Dairi Prima Mineral, an Indonesian joint venture between the Beijing-based mining conglomerate China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC) and Bumi Resources Minerals, a subsidiary of the Indonesian coal-mining giant Bumi Resources. The companies are seeking to build an underground mine to commercially extract zinc, lead and silver ore.	Tambang seng yang dibangun Dairi Prima Mineral, sebuah perusahaan joint venture Indonesia antara perusahaan konglomerat (gabungan) tambang yang berbasis di Beijing, China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC) dan Bumi Resources Minerals, anak perusahaan tambang batu bara raksasa Indonesia, Bumi Resources. Perusahaan pertambangan tersebut ingin membangun penambangan bawah tanah untuk mengekstraksi secara komersial seng, timah, dan bijih perak.
12	The developers will likely construct a tailings facility near the mining site, where toxic waste will be stored. If not properly built and maintained, tailings ponds can fail, releasing toxic waste into the environment. In Brazil, two tailings dams collapsed in 2015 and 2019, releasing waves of toxic sludge that killed nearly 300 people.	Pengembang kemungkinan besar akan membangun fasilitas tailing di dekat lokasi tambang, di mana limbah beracun akan disimpan. Jika tidak dibangun dan dikelola dengan layak, kolam tailing bisa runtuh, dan melepaskan limbah beracun ke lingkungan sekitarnya. Di Brasil, dua bendungan tailing runtuh pada tahun 2015 dan 2019, mengalirkan gelombang lumpur beracun yang menewaskan hampir 300 orang banyaknya.
13	Inclusive Development International also commissioned a report on the seismic risks posed by the project. Dr. Richard Meehan of Stanford University concluded that the "Dairi Mine is located in one of the highest risk areas in the world." near the Sumatra subduction megathrust which produced in 2004 and 2005 earthquakes of magnitude 9 and 8+ respectively. The minesite is also only 15 kilometers from the Great Sumatra fault which produces long duration or repeated earthquakes, notorious for destroying civil structures like tailings dams. "This repetition or longevity of shaking can completely destroy structures including dams	Inclusive Development International juga telah mengeluarkan laporan mengenai risiko seismik akibat proyek. Dr. Richard Meehan dari Universitas Stanford memberikan kesimpulannya bahwa "Tambang Dairi terletak di salah satu area paling berisiko di dunia, di mana ia terletak dekat dengan megathrust subduksi Sumatra yang pada 2004 dan 2005 menghasilkan gempa bumi dengan kekuatan masing-masing 9 dan 8+. Lokasi tambang juga hanya berjarak 15 kilometer dari sesar besar Sumatra yang mampu menghasilkan gempa berdurasi panjang atau berulang, yang terkenal mampu menghancurkan bangunan-bangunan sipil semacam bendungan.

	that would otherwise survive a short-duration quake with only partial collapse” This, combined with the area’s very heavy annual rainfall, led Dr. Meehan to predict that “within a few decades after the ‘closure’ of the deposit, an earthquake-induced sudden failure of the tailings dam would send “a wave of liquid mud downstream to the north.”	“Pengulangan atau lamanya guncangan ini bisa memporak-porandakan bangunan, termasuk bendungan yang sebenarnya hanya bisa bertahan dalam guncangan berdurasi pendek dan hanya akan mengalami runtuh sebagian. Faktor ini ditambah dengan curah hujan tahunan yang tinggi, membuat Dr. Meehan memprediksi bahwa “dalam kurun beberapa dekade saja setelah “penutupan” deposit/endapan, kerusakan bendungan tailing secara mendadak yang dipicu gempa akan mengalirkan “gelombang lumpur turun ke hilir ke arah utara.”
14	In 2005, Dairi Prima Mineral conducted an environmental impact assessment of the proposed mine. Since then, however, mine plans have changed and a significantly larger mine has been proposed. In 2019, DPM has been notified that it required new environmental approval. Despite that new approval not being granted, the mine proceeds with construction. Residents have expressed concern about potential dangers to animals and humans living near the mine. Local community members say they have not been appropriately consulted about the project. They fear the mine could pollute water sources, and harm soil and crops.	Pada tahun 2005, Dairi Prima Mineral melakukan penilaian dampak lingkungan untuk tambang yang diajukan tersebut. Sejak itu, entah bagaimana, rencana/desain tambang berubah dan tambang yang jauh lebih besar diusulkan. Pada 2019, pemberitahuan sudah diberikan kepada DPM untuk memperbarui persetujuan lingkungannya. Namun, meski persetujuan baru belum diberikan, tambang tetap melanjutkan pembangunannya. Penduduk telah menyampaikan kekhawatiran mereka berkaitan dengan potensi bahaya yang bisa diakibatkan kepada binatang dan manusia yang hidup dekat tambang. Anggota masyarakat setempat menyatakan bahwa mereka tidak pernah diajak berdiskusi tentang proyek tersebut. Mereka khawatir tambang akan bisa mencemari sumber air dan membahayakan tanah serta tanaman mereka.
15	On October 31, 2019, the Investor Mining and Tailings Safety Initiative announced that its 96 members, mostly institutional investors and pension funds, would consider divesting from mining firms that failed to disclose their tailings dams – and how they are mitigating risk at these facilities. Bumi Resources Minerals failed to respond to requests for disclosure.	Pada 31 Oktober 2019, Investor Mining and Tailings Safety Initiative mengumumkan bahwa 96 anggotanya, umumnya adalah investor kelembagaan dan dana pensiun, tengah mempertimbangkan akan melakukan divestasi perusahaan tambang yang tidak membuka informasi tentang bendungan tailing mereka – dan bagaimana mereka memitigasi risiko di fasilitas tersebut. Bumi Resources Minerals dalam hal ini tidak menanggapi permintaan untuk membuka informasi tersebut.
16	Besides the threat to land and livelihood, all the organizations concerned that Indonesians opposing destructive corporate projects have faced escalating violence. Three environmental human rights defenders have been killed in North Sumatra since October 2019.	Selain ancaman terhadap tanah dan mata pencaharian, Inclusive Development International juga mengkhawatirkan bahwa orang Indonesia yang melawan proyek-proyek korporasi yang destruktif menghadapi kekerasan yang semakin meningkat. Sudah ada tiga aktivis pembela HAM lingkungan di Sumatra Utara terbunuh sejak Oktober 2019.
17	“As this case goes forward, the Indonesian government and the company must prioritize the safety and wellbeing of community members and the activists who support them,” Pred said.	“Karena kasus ini sudah bergulir, pemerintah Indonesia dan perusahaan harus memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan anggota masyarakat dan aktivis yang membantu mereka,” sambung Pred.

18	“The citizens' complaints to CAO have also sent to the Chinese government so that the Chinese Ministry of Commerce can be aware of the complaint, and ask the Chinese institutions can address the concerns of the communities” said Manambus Pasaribu. “They probably do not know the risks present in the local area, so we want to talk with them”.	“Pengaduan warga kepada CAO juga telah dikirim ke pemerintah Tiongkok sehingga Kementerian Perdagangan Tiongkok juga mengetahui perihal pengaduan tersebut, dan meminta lembaga-lembaga Tiongkok agar mengatasi kekhawatiran masyarakat tersebut” kata Manambus Pasaribu. “Mereka mungkin tidak tahu risiko yang ada di daerah setempat, jadi kami ingin berbicara dengan mereka.”
----	---	---

For more information, please contact:

In Indonesia

Merah Johansyah, National Coordinator of JATAM (Bahasa Indonesia and English): +62 813 4788 2228 (phone, Whats App, Signal);
merahjohansyah@gmail.com cc jatam@jatam.org

Manambus Pasaribu, Executive Secretary BAKUMSU (Indonesian): +62 813-6152-8646 (phone, whats app, signal), bush_pasrib@yahoo.com

Diakones Sarah Naibaho, Director YDPK Parongil (Bahasa Indonesia and English): +62 812 6903 0128 (phone, Whats App, Signal);
diakonessarah@protonmail.com

Ridwan Samosir, Executive Secretary of Petrasa Foundation (Bahasa Indonesia and English): +62 812 6988 3818 (phone, Whats App, Signal)
samosirridwan1980@gmail.com

In USA, Eastern Standard Time (English):

David Pred; +1 917-280-2705; david@inclusivedevelopment.net; Twitter: @preddavid